

**PERANAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM RANGKA
PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP NOTARIS YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN PROMOSI JABATAN DI KOTA
PEKANBARU**

Eliza Safitri¹ dan Sutanto²

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui peranan Dewan Kehormatan Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran promosi jabatan di Kota Pekanbaru, (2) mengetahui bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada Notaris yang terbukti melakukan promosi jabatan di Kota Pekanbaru, (3) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta usaha untuk mengatasi adanya kendala oleh Dewan Kehormatan Daerah dalam menegakkan kode etik terhadap Notaris yang melakukan promosi jabatan di Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *non probability sampling*, dengan memakai *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran promosi jabatan setelah adanya laporan yang disampaikan oleh anggota Notaris yang melihat langsung terjadinya pelanggaran berupa papan karangan bunga yang dikirimkan oleh Notaris yang mencantumkan nama dan jabatan Notaris tersebut, selanjutnya ketua Dewan Kehormatan Daerah berkoordinasi dengan anggotanya dan mengumpulkan bukti dengan cara mengambil foto karangan bunga tersebut dan mencetaknya, kemudian Dewan Kehormatan Daerah mengirimkan surat undangan kepada Notaris yang melanggar untuk didengar keterangannya. Dewan Kehormatan Daerah menggunakan Pasal 9 Kode Etik Notaris sebagai pertimbangan menyelesaikan pelanggaran promosi jabatan. Sanksi yang diberikan yaitu teguran lisan yang merupakan pembinaan terhadap. Kendala dalam penegakkan kode etik adalah Notaris yang tidak peduli terhadap teguran, kesibukan dari masing-masing anggota Dewan Kehormatan Daerah, rasa segan antar teman sejawat, upaya untuk mengatasi kendala dengan melakukan pembinaan dan bimbingan rutin dalam rapat anggota.

Kata Kunci: Dewan Kehormatan Daerah, Promosi Jabatan, Kode Etik Notaris

¹ Jl. Kali Putih, No. 15, Tangkerang Utara, Pekanbaru

² Dosen Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**ROLE OF DISTRICT COURTESY BOARD IN ENFORCING
ETHIC CODE OF NOTARY OFFICERS VIOLATING PROMOTION
IN PEKANBARU CITY**

Eliza Safitri³ and Sutanto⁴

ABSTRACT

This study aims to (1) understand role of District Courtesy Board in enforcing Ethic Code of notary officers Breaking Promotion in Pekanbaru City; (2) understand sanction given by the District Courtesy Board to the notary officers found breaking Promotion in Pekanbaru City; (3) understand problems facing the District Courtesy Board and efforts made by the District Courtesy Board to solve the problems in enforcing ethic code of notary officers found breaking Promotion in Pekanbaru City.

This study is juridical-empirical research. This research was done in Pekanbaru City, Province of Riau. Samples were taken by *non-probability sampling*, using *purposive sampling*. Data were analyzed using qualitative approach and the results are presented descriptively.

The results of research indicate that the District Courtesy Board of Pekanbaru City examined the notary officers found breaking promotion after reporting of notary members seeing directly violation (infringements) such as coronet sent by notary officers who wrote their name and position; furthermore, Head of District Courtesy Board coordinated with members and collected evidences by taking photos of the coronet and printing these, then the District Courtesy Board sent invitation letter to the notary officers found breaking to be asked for his information. The District Courtesy Board used Article 9 of Ethic Code as consideration to solve position promotion problem. Sanction given was oral notification as admonition. Constraints facing Ethic code Enforcement indicated that the notary officers did not care for admonition, each of District Courtesy Board's members were busy, there were reluctances of associates, efforts to overcome the constraints by guiding and counseling routinely in member meeting.

Keywords: District Courtesy Board, Promotion, Ethic code of notary officers.

³ Jl. Kali Putih No.15, Tangkerang Utara, Pekanbaru.

⁴ Postgraduate Student Lecturer, Magister of Notary, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.